

PETA RENCANA

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (ICT) DI
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KONSTITUSI

PERIODE 2020 S.D. 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Peserta



Nama Lengkap : Herman Pamuji, S.Hum
Tanggal Lahir : /1987-11-30
Umur : 33 tahun 4 bulan 27 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki

E-PUSDIK

Mahkamah Konstitusi RI

SIGN IN MENGGUNAKAN LOGIN KOMPUTER

NIP

Password

SIGN IN

Klik disini untuk login sebagai petugas selain pegawai

MAHKAMAH KONSTITUSI

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Peta Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Periode 2020 s.d. 2024 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah unit kerja eselon II yang berada pada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan tugas dan fungsi memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berupaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), baik dalam layanan administrasi pemerintahan maupun dukungan penyelenggaraan kegiatan sebagai layanan kepada peserta kegiatan.

Komitmen Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya direalisasikan dengan mengembangkan sistem informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara kontinu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem informasi, khususnya Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). Menyadari pentingnya peranan sistem informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan, maka diperlukan sebuah peta rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang digunakan sebagai pedoman bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Peta Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Periode 2020 s.d. 2024 disusun dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kami berharap peta rencana pengembangan TIK yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat terwujudnya SPBE yang efektif, efisien, inovatif, serta membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Bogor, Juli 2021

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum	2
3. Visi dan Misi SPBE	2
4. Tujuan	3
B. PETA RENCANA	4
1. Sistem Informasi	5
a) Tahun 2020	5
b) Tahun 2021	5
c) Tahun 2022	5
d) Tahun 2023.....	5
e) Tahun 2024	8
2. Infrastruktur	6
a) Tahun 2020	6
b) Tahun 2021	6
c) Tahun 2022	7
d) Tahun 2023.....	7
e) Tahun 2024	7
C. PENUTUP.....	8

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dirasakan sangat cepat dan penting sehingga mampu membawa perubahan berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aspek kinerja pemerintahan. Sistem informasi kini telah menjadi kerangka dasar bagi sebagian besar aktifitas pemerintahan dan memungkinkan bagi fungsi manajerial dalam upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien. Teknologi informasi dan komunikasi mampu menghilangkan jarak dan sekat waktu, sehingga arus informasi, akses pelayanan dan kecepatan transaksi menjadi sebuah kebutuhan.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dalam pemerintahan serta kondisi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital ini, maka diperlukan perencanaan yang baik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi mendukung penerapan SPBE secara berkesinambungan. Komitmen untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, salah satunya direalisasikan dengan mengembangkan sistem informasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara kontinu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem informasi, khususnya Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). Hasil monitoring dan evaluasi tersebut kemudian menjadi acuan pengembangan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE diperlukan sebuah peta rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang digunakan sebagai

pedoman bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk mencapai SPBE yang terpadu. Sebagai langkah awal, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan Peta Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 s.d. 2024.

Peta Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi disusun dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- c. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
- g. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

3. Visi dan Misi SPBE

Visi SPBE adalah “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif dan responsif dan adaptif.

Untuk mencapai visi SPBE di atas, misi SPBE antara lain sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh;
- b. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan andal; dan
- c. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

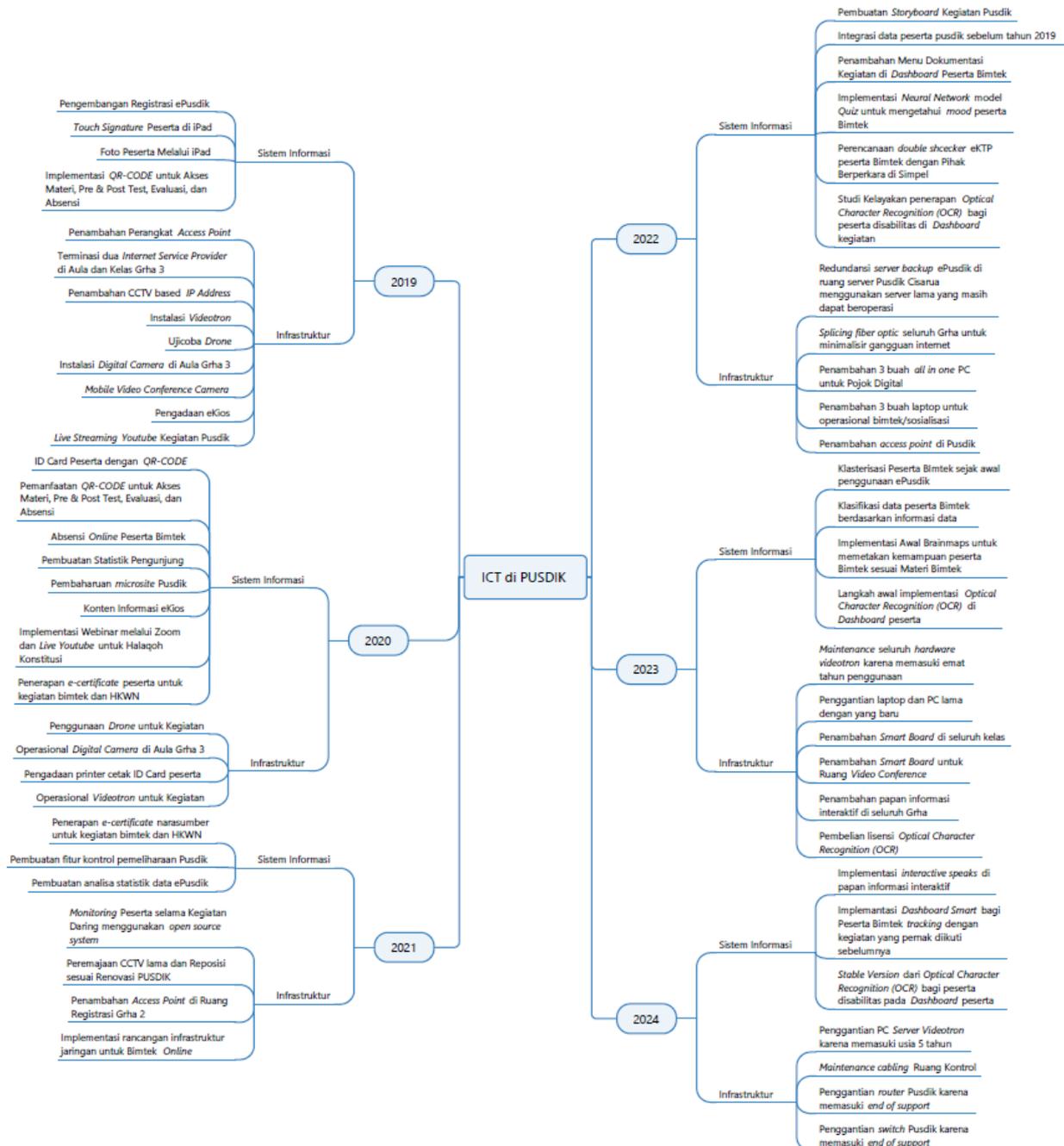
4. Tujuan

Tujuan Peta Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi antara lain:

- a. Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan SPBE yang terpadu di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- b. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

B. PETA RENCANA

Dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan peta rencana sebagai acuan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) ke depan. Berikut ini peta rencana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sampai dengan tahun 2024.



Peta Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Periode 2019 s.d. 2024

1. Sistem Informasi

a) Tahun 2020

- Penambahan *QR Code* pada kartu tanda (*ID Card*) peserta.
- Pemanfaatan fitur *QR Code* pada kartu tanda (*ID Card*) peserta untuk masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN). Ketika peserta memindai (*scan*) *QR Code* tersebut menggunakan *smartphone*, maka peserta akan diarahkan ke laman Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) yang merupakan media untuk mengunduh materi, mengerjakan pre-test dan post-test, pengisian kuesioner evaluasi serta melakukan pencatatan kehadiran (*presensi*).
- Penambahan fitur pencatatan kehadiran (*presensi*) secara daring bagi peserta melalui menu pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- Pembuatan statistik pengunjung pada *microsite* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Pembaharuan tampilan dan fitur pada *microsite* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Pembaharuan konten informasi pada media e-Kios.
- Implementasi webinar melalui aplikasi Zoom dan kanal Youtube secara *live* dalam kegiatan Halaqah Konstitusi.
- Penerapan fitur e-Sertifikat bagi peserta kegiatan yang bisa diunduh melalui menu pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

b) Tahun 2021

- Penerapan fitur e-Sertifikat bagi narasumber kegiatan.
- Pembuatan fitur kontrol pemeliharaan di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Pembuatan analisa statistik data pada sistem informasi epusdik.mkri.id.

c) Tahun 2022

- Pembuatan *storyboard* kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Integrasi data peserta kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebelum tahun 2019.
- Penambahan menu Dokumentasi Kegiatan pada laman *dashboard* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- Implementasi *Neural Network Model Quiz* untuk mengetahui *mood* peserta kegiatan.

- Perencanaan *double checker* e-KTP peserta kegiatan dengan para pihak yang berperkara melalui data yang diperoleh dari simpel.mkri.id.
- Studi kelayakan penerapan *Optical Character Recognition* (OCR) bagi peserta disabilitas pada laman *dashboard* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

d) Tahun 2023

- Klasterisasi peserta kegiatan sejak awal penggunaan sistem informasi epusdik.mkri.id.
- Implementasi awal *Brainmaps* untuk memetakan kemampuan peserta kegiatan sesuai materi.
- Langkah awal implementasi *Optical Character Recognition* (OCR) bagi peserta disabilitas pada laman *dashboard* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

e) Tahun 2024

- Implementasi *Interactive Speaks* di papan informasi interaktif.
- Implementasi *Dashboard Smart* bagi peserta kegiatan, penelusuran (*tracking*) dengan kegiatan yang pernah diikuti sebelumnya.
- *Stable Version* dari *Optical Character Recognition* (OCR) bagi peserta disabilitas pada laman *dashboard* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

2. Infrastruktur

a) Tahun 2020

- Penggunaan *drone* untuk dokumentasi kegiatan.
- Operasional *digital camera* di Aula Grha Konstitusi 3.
- Pengadaan *printer* untuk mencetak kartu tanda (*ID Card*) peserta.
- Penggunaan *videotron* dalam penyelenggaraan kegiatan.

b) Tahun 2021

- Monitoring peserta selama kegiatan daring menggunakan *open source system*.
- Peremajaan kamera CCTV lama dan reposisi sesuai renovasi gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Penambahan *access point* di Ruang Registrasi Grha Konstitusi 2.
- Implementasi rancangan infrastruktur jaringan untuk kegiatan daring.

c) Tahun 2022

- Redudansi *server back up* sistem informasi epusdik.mkri.id di ruang *server* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- *Splicing fiber optic* seluruh grha konstitusi untuk meminimalisir gangguan internet.
- Penambahan 3 (tiga) buah *all in one* komputer (PC) untuk pojok digital.
- Penambahan 3 (tiga) buah laptop untuk operasional kegiatan.
- Penambahan *access point* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

d) Tahun 2023

- Pemeliharaan seluruh *hardware videotron* karena memasuki 4 (empat) tahun penggunaan.
- Penggantian computer (PC) dan laptop lama dengan yang baru.
- Penambahan *Smart Board* di seluruh ruang kelas Grha Konstitusi 3.
- Penambahan *Smart Board* di Ruang *Video Conference* Grha Konstitusi 2.
- Penambahan papan informasi interaktif di seluruh Grha Konstitusi.
- Pembelian lisensi *Optical Character Recognition (OCR)*.

e) Tahun 2024

- Penggantian komputer (PC) *server videotron* karena memasuki usia 5 (lima) tahun.
- Pemeliharaan *cabling* Ruang Kontrol Grha Konstitusi 3.
- Penggantian *router* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi karena memasuki *end of support*.
- Penggantian *switch* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi karena memasuki *end of support*.

C. PENUTUP

Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Peta Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 s.d. 2024 serta berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pada prinsipnya, seluruh program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tertuang dalam Peta Rencana Pengembangan TIK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diarahkan pada hal-hal yang berkontribusi secara strategis untuk semakin meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Sinergi yang kuat antara Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi prasyarat untuk mencapai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang terpadu dan menyeluruh, baik dalam aspek sistem informasi maupun dalam aspek infrastruktur.

Peta Rencana Pengembangan TIK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang disusun telah mencakup tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan SPBE sampai tahun 2024 mendatang. Peta Rencana Pengembangan TIK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan diperbarui setelah ditetapkannya Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi untuk periode berikutnya.